

ANALISIS IMLEMENTASI PP NO 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KOTA BATAM

Gheta Novelia, Sri Erlinda, Zahirman

ghetanovelia@gmail.com 081364692903

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293

Abstract: This study in the wake increasing human life expectancy to the number of elderly continues to increase but not accompanied by an increase in social welfare service various fields for the elderly, as a result many elderly need based on government regulation number 43 of 2004 has not been fulfilled so many elderly has problem in the implementation of the social function and cannot life decent and dignified life in. the formulation of the problem for this study is how the implementation of government regulation Number 43 of 2004 concerning in the implementation of effort to instruct social welfare for elderly in the Batam City? This study aims to determine the implementation of effort to improve the social welfare of the elderly in the Batam City based on government regulation number 43 of 2004. Sampling technique using purposive sampling with the number of respondent 45 persons, consisting of 2 employees of social service and cemetery in Batam, 3 nursing home manager, 20 elderly persons from nursing home and 20 elderly persons non nursing home. These data were collected through questioner, interview and observation technique. Data were analyses using descriptive quantitative. Based on the research that the author get, conclude that the implementation of government regulation Number 43 of 2004 concerning in the implementation of effort to instruct social welfare for elderly in the Batam City being in the unfavorable category, the percentage gains in the unfavorable category by 64% and in good category by 36%.

Keyword: Implementation, Government Regulation, Welfare, Elderly

**Wisuda Oktober 2014
Karya ilmiah
11 Juli 2014**

ANALISIS IMPLEMENTASI PP NO 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KOTA BATAM

Gheta Novelia, Sri Erlinda, Zahirman

ghetanovelia@gmail.com 081364692903

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka harapan hidup manusia sehingga jumlah lansia terus meningkat namun tidak disertai dengan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial di berbagai bidang bagi lansia, akibatnya banyak kebutuhan lansia berdasarkan PP No 43 Tahun 2004 belum terpenuhi sehingga banyak lansia mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya dan tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana implementasi PP No 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia di Kota Batam? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kota Batam berdasarkan PP No 43 tahun 2004. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah responden 45 orang, terdiri dari 2 orang pegawai dinas sosial dan pemukiman Kota Batam, 3 orang pengelola panti jompo, 20 orang lansia panti dan 20 orang lansia non panti. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, kuesioner dan wawancara. Data di analisis menggunakan cara deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, disimpulkan bahwa implementasi PP No 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kota Batam berada pada kategori kurang baik, dengan perolehan persentase pada kategori kurang baik sebesar 64% dan pada kategori baik sebesar 36%.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Pemerintah, Kesejahteraan Sosial, Lanjut Usia

**Wisuda Oktober 2014
Karya ilmiah
11 Juli 2014**

PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dalam Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Salah satu golongan warga negara yang rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial ini berasal dari golongan lanjut usia.

Meningkatnya jumlah lansia yang signifikan dari tahun ketahun tersebut tentu saja akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Lanjut usia merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang eksis berada ditengah-tengah masyarakat. Khususnya lansia yang masuk dalam kategori lanjut usia tidak potensial yaitu lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain (**UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia**).

Terdapat berbagai masalah sosial yang menjadi penyebab ketelantaran lanjut usia, misalnya masalah sosial ekonomi dan keluarga yang tidak bertanggung jawab akan kewajiban memenuhi kebutuhan para orang tua lanjut usianya. Sehingga para anak atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka.

Sebagai kota urban, pertumbuhan penduduk Batam terbilang pesat. Pada periode tahun 1990-2000, laju pertumbuhan penduduk mencapai 12,87%. Namun sejak dibatasi Perdaduk (Peraturan Daerah Kependudukan) pada tahun 2001 hingga 2006, pertumbuhannya bisa ditekan menjadi 6,36%. Sampai agustus 2007, penduduk Batam berjumlah 727.878 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan. Menurut Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam Sadri Khairuddin, hingga Desember 2008 total penduduk Batam 899.944 jiwa dengan jumlah lansia mencapai 13.981 jiwa. Kebanyakan dari lansia berdomisili di pulau-pulau dan kawasan *hinterland* yaitu kawasan di sepanjang pinggiran pantai yang jauh dari pusat kota dan pemerintahan.

Di Kota Batam juga permasalahan kesejahteraan lansia menjadi salah satu masalah sosial yang banyak terjadi. Tidak sedikit keluarga yang menitipkan orang tua lanjut usianya ke panti-panti jompo, hal ini biasanya terkait kondisi ekonomi keluarga yang kurang atau dapat juga dikarenakan menurunnya perhatian dan kepedulian anak terhadap orang tua lansianya. Tidak jarang di jumpai lansia dalam kondisi kesehatan yang buruk akibat kurangnya perhatian dan pelayanan kesehatan bagi mereka, padahal pelayanan kesehatan sangat diperlukan bagi lansia untuk dapat meningkatkan kondisi fisik dan mentalnya. Disamping itu, aksesibilitas yang berguna untuk membantu lansia dalam melaksanakan fungsi sosialnya masih minim disediakan di sarana prasarana umum seperti tempat

rekreasi, angkutan umum, jalan umum serta bangunan umum begitu juga petunjuk-petunjuk khusus bagi lansia.

Kondisi lansia yang berada diluar panti juga masih banyak yang kurang mendapat perlindungan sosial baik dari pemerintah maupun masyarakat. Namun ada juga peran pemerintah dan masyarakat dengan mengadakan kegiatan yang melibatkan lansia dan memberikan mereka bantuan sosial baik berupa barang maupun dana, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum merata dan belum dirasakan oleh seluruh lansia yang membutuhkan. Tidak kalah penting juga penyuluhan dan penyebarluasan berbagai informasi baik dibidang kesehatan, pendidikan, hukum, pekerjaan dan administrasi khusus bagi lansia yang masih minim dilakukan, akibatnya masih banyak masyarakat khususnya keluarga dan lansia itu sendiri yang tidak mengerti dan menyebabkan kesejahteraan sosial lansia masih banyak yang terabaikan.

Ketelantaran ini yang menyebabkan para lanjut usia tidak dapat menikmati hari tuanya secara wajar. Kondisi tersebut merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi, oleh karena itu diperlukan peran baik dari masyarakat maupun pemerintah demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi lansia yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Dengan adanya PP No 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, maka diharapkan permasalahan kesejahteraan sosial lanjut usia yang ada di Kota Batam dapat segera diatasi. Peraturan Pemerintah ini dapat berjalan dengan baik apabila pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam dan Panti Jompo yang ada di Kota Batam menjalankannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Batam. Rumusan masalah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Batam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi PP No 43 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Batam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris yang meneliti tentang efektivitas hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia (**Zainuddin, 2009:31**). Penelitian ini bertujuan memaparkan keadaan dilapangan, maka data yang akan diperoleh akan dianalisis dengan sistem deskriptif kuantitatif dengan menggunakan presentase (**Suharsimi Arikunto, 2002:209**).

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam yang berada di Jalan Raja Ali Haji, Sekupang serta Panti Jompo di Kota Batam. Waktu

penelitian dilakukan pada bulan April 2014 sampai dengan Juni 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, Penyelenggara Panti Jompo di Kota Batam dan Para Lanjut Usia di Kota Batam yang menurut BPS Kepri tahun 2012 berjumlah 39.072 jiwa. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dan sampel yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan menangani permasalahan lansia, untuk Pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam penulis mengambil sampel sebanyak 2 orang dari bagian pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengelola Panti Jompo sebanyak 3 orang dan para lanjut usia sebanyak masing-masing 10 orang dari dua panti jompo di Kota Batam dan 20 orang lanjut usia non panti.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, kuesioner dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan memaparkan keadaan dilapangan, maka data yang akan diperoleh akan dianalisis dengan sistem deskriptif kuantitatif dengan menggunakan presentase (**Suharsimi Arikunto, 2002:209**). setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya ditabulasikan kemudian di kelompokkan dan dianalisis, dimana data yang diperoleh disusun dan di berikan penjelasan yang diperlukan. Kepada setiap responden diberikan pernyataan dengan pilihan jawaban

- a. Ya
- b. Tidak

Alternatif jawaban tersebut digunakan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan. (**Sugiyono, 2013**)

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data yang diinginkan.
2. Mengklasifikasikan alternatif jawaban responden.
3. Menentukan besarnya presentase alternatif jawaban responden dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

(**Sudjono dalam Skripsi Nurul Fadillah, 2012: 48**).

Keterangan:

P = Besar presentase alternatif jawaban.

F = Frekuensi alternatif jawaban responden.

N = Jumlah sampel penelitian.

4. Menyajikan data dalam bentuk tabel.
5. Memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan.

Hasil analisis dikelompokkan menurut presentase jawaban responden dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan.

Adapun tolak ukur untuk implementasi PP No 43 Tahun 2004 ini adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 51% - 100% = Baik
2. Sebesar 0% - 50% = Kurang Baik (**Husaini Usman, 2011**)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi PP No 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Batam

Berdasarkan PP No 43 Tahun 2004, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dapat dilihat dari 8 indikator meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesempatan kerja, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan layanan dan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan bantuan sosial yang kemudian dirincikan menjadi beberapa sub-indikator. Berikut tabel rekapitulasi data tentang Implementasi PP No 43 berdasarkan hasil penelitian:

Tabel Rekapitulasi Data Tentang Implementasi PP No 43 Tahun 2004 di Kota Batam

No	Daftar Pertanyaan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1	Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual	23	52	22	48
2	Pelayanan Kesehatan	28	62	17	38
3	Pelayanan Kesempatan Kerja	5	12	40	88
4	Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan	8	17	37	83
5	Pemberian Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum	7	15	38	85
6	Pemberian Perlindungan Sosial	29	63	16	37
7	Bantuan Sosial	15	34	30	66
Jumlah		115	255%	200	445%
Rata-rata		16	36%	29	64%

Sumber: Data Olahan Tahun 2014

Berdasarkan tabel rekapitulasi data diatas, dapat kita ketahui bahwa implementasi PP No 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Batam berada pada kategori kurang baik, dengan jumlah responden yang menjawab kurang baik sebanyak 29 responden atau 64% dan yang menjawab baik hanya sebanyak 16 responden atau 36%.

Pembahasan

Ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai responden dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan, diantaranya jumlah responden, identitas responden berdasarkan jenis kelamin dan identitas responden berdasarkan umur.

Tabel Jumlah Responden

No	Responden	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Dinsos dan Pemakaman	2	4%
2	Pengelola Panti Jompo	3	7%
3	Lanjut Usia	40	89%
Jumlah		45	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, maka jumlah responden dari pegawai Dinsos dan Pemakaman kota Batam sebanyak 2 orang atau 4% dari jumlah responden seluruhnya, yaitu Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Kepala Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lansia. Sebanyak 3 orang atau 7% dari jumlah seluruh responden merupakan pengelola Panti Jompo di kota Batam yang berasal dari dua panti berbeda yaitu 1 orang dari Panti Jompo Buddhayana dan 2 orang dari Panti Jompo Annisa Ummul Khairat. Sedangkan responden lanjut usia berjumlah 40 orang atau 89% dari jumlah responden seluruhnya, 20 orang lanjut usia non panti dan 10 orang lanjut usia dari masing-masing panti jompo.

Berdasarkan hasil penelitian pada kantor Dinas Sosial dan Pemakaman kota Batam, Panti Jompo, Posyandu dan Graha Lansia, serta Lanjut Usia yang ada di kota Batam dengan menggunakan angket dan wawancara, maka penulis memaparkan hasil penelitiannya per indikator sebagai berikut:

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan dengan peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing lanjut usia. Berikut data rekapitulasi tentang pelayanan keagamaan dan mental spiritual berdasarkan PP No 43 Tahun 2004:

Tabel Rekapitulasi Data Tentang Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

No	Daftar Pertanyaan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1	Pelayanan keagamaan	38	84	7	16
2	Pelayanan mental spiritual	28	62	17	38
3	Pembangunan sarana ibadah disertai aksesibilitas bagi lansia	4	9	41	91
Jumlah		70	155%	65	145%
Rata-rata		23	52%	22	48%

Sumber: Data Olahan Tahun 2014

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat kita ketahui bahwa implementasi pada pelayanan keagamaan dan mental spiritual yang berada pada kategori “Baik” sebesar 52% dan yang berada pada kategori “Kurang Baik” sebesar 48%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi terhadap adanya pelayanan keagamaan dan mental spiritual berada pada kategori “Baik”.

2. Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Berikut data rekapitulasi tentang pelayanan kesehatan berdasarkan PP No 43 Tahun 2004:

Tabel Rekapitulasi Data Tentang Pelayanan Kesehatan

No	Daftar Pertanyaan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1	Penyuluhan tentang kesehatan bagi lansia	26	58%	19	42%
2	Penyebarluasan informasi tentang kesehatan lansia	26	58%	19	42%
3	Upaya penyembuhan di bidang kesehatan lansia	45	100%	0	0%
4	Pengembangan lembaga perawatan bagi lansia penderita penyakit kronis	7	16%	38	84%
5	Keringanan biaya dalam pelayanan kesehatan bagi lansia kurang mampu	34	76%	11	24%
Jumlah		138	308%	87	192%
Rata-rata		28	62%	17	38%

Sumber: Data Olahan Tahun 2014

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat kita ketahui bahwa implementasi pada pelayanan kesehatan yang berada pada kategori “Baik” sebesar 62% dan yang berada pada kategori “Kurang Baik” sebesar 38%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi terhadap adanya pelayanan kesehatan berada pada kategori “Baik”.

3. Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial (lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa) dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan dan pengalaman yang dimilikinya. Berikut data rekapitulasi tentang pelayanan kesempatan kerja berdasarkan PP No 43 Tahun 2004:

Tabel Rekapitulasi Data Tentang Pelayanan Kesempatan Kerja

No	Daftar Pertanyaan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1	Adanya pemberian bantuan sosial bagi lansia yang terampil dan memiliki usaha sendiri/perorangan	4	9	41	91
2	Adanya pemberian bantuan sosial bagi lansia yang terampil dan memiliki kelompok usaha bersama	2	4	43	96
3	Adanya peran aktif dari dunia usaha dalam menumbuhkan iklim usaha yang baik bagi lansia	5	11	40	89
4	Adanya peran aktif dari masyarakat dalam menumbuhkan iklim usaha yang baik bagi lansia	10	22	35	78
Jumlah		21	46%	159	354%
Rata-rata		5	12%	40	88%

Sumber: Data Olahan Tahun 2014

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat kita ketahui bahwa implementasi pada pelayanan kesempatan kerja yang berada pada kategori “Baik” sebesar 12% dan yang berada pada kategori “Kurang Baik” sebesar 88%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi terhadap adanya pelayanan kesempatan kerja berada pada kategori “Kurang Baik”.

4. Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman lansia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berikut data rekapitulasi tentang pelayanan pendidikan dan pelatihan berdasarkan PP No 43 Tahun 2004:

Tabel Rekapitulasi Data Tentang Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

No	Daftar Pertanyaan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1	pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan lansia	0	0	45	100
2	pelatihan untuk meningkatkan keahlian lansia	0	0	45	100
3	pelatihan untuk meningkatkan keterampilan lansia	19	42	26	58
4	pelatihan untuk meningkatkan kemampuan lansia	19	42	26	58
5	pelatihan untuk meningkatkan pengalaman lansia	0	0	45	100
Jumlah		38	84%	187	416%

Rata-rata	8	17%	37	83%
------------------	----------	------------	-----------	------------

Sumber: Data Olahan Tahun 2014

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat kita ketahui bahwa implementasi pada pelayanan pendidikan dan pelatihan yang berada pada kategori “Baik” sebesar 17% dan yang berada pada kategori “Kurang Baik” sebesar 83%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi terhadap adanya pelayanan pendidikan dan pelatihan berada pada kategori “Kurang Baik”.

- Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada para lansia. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam fasilitas umum ini diberikan melalui kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan, kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan dan penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus. Sedangkan pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan kemudahan (aksesibilitas) terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia. Berikut data rekapitulasi tentang pelayanan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum berdasarkan PP No 43 Tahun 2004:

Tabel Rekapitulasi Data Tentang Pemberian Kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum

No	Daftar Pertanyaan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1	kemudahan dalam pelayanan administrasi untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup	29	64	16	36
2	kemudahan dalam pelayanan administrasi untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak negara	0	0	45	100
3	kemudahan dalam pelayanan administrasi untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah	40	89	5	11
4	kemudahan dalam pelayanan administrasi untuk melaksanakan pernikahan	0	0	45	100
5	kemudahan dalam pelayanan untuk pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum	2	4	43	96
6	kemudahan dalam pelayanan untuk akomodasi	0	0	45	100
7	keringanan biaya untuk pembayaran pajak	0	0	45	100
8	kemudahan dalam pelayanan untuk pembelian tiket masuk tempat rekreasi	0	0	45	100

9	keringanan biaya untuk pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum	2	4	43	96
10	keringanan biaya untuk akomodasi	0	0	45	100
11	keringanan biaya untuk pembelian tiket masuk tempat rekreasi	0	0	45	100
Jumlah		73	161%	422	939%
Rata-rata		7	15%	38	85%

Sumber: Data Olahan Tahun 2014

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat kita ketahui bahwa implementasi pada pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum yang berada pada kategori “Baik” sebesar 15% dan yang berada pada kategori “Kurang Baik” sebesar 85%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi terhadap adanya pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum berada pada kategori “Kurang Baik”.

6. Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada para lansia. Kemudahan layanan dan bantuan hukum ini diberikan melalui penyuluhan dan konsultasi hukum, serta layanan dan bantuan hukum baik diluar maupun di dalam pengadilan. Berdasarkan penelitian melalui wawancara dan data angket yang disebar, semua responden menjawab “Tidak” dikarenakan para lansia tidak pernah mendapatkan penyuluhan dan konsultasi di bidang hukum, baik bagi lansia di dalam panti maupun diluar panti. Selain itu, pemberian penyuluhan dan konsultasi dibidang hukum bagi para lansia dirasa tidak diperlukan, sehingga kegiatan itu tidak pernah diberikan. Begitu pula dengan pemberian layanan dan bantuan hukum baik diluar maupun didalam panti, tidak ada diberikan kepada para lansia disebabkan diusia mereka rata-rata juga sudah tidak pernah lagi bersentuhan dengan bidang hukum dan belum pernah terlibat kasus hukum yang menyebabkan mereka harus diadili dipengadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi terhadap adanya pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum berada pada kategori “Kurang Baik”.
7. Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar, baik bagi lansia yang berada di dalam panti maupun mereka yang berada diluar panti jompo. Berikut data rekapitulasi tentang pemberian perlindungan sosial berdasarkan PP No 43 Tahun 2004:

Tabel Rekapitulasi Data Tentang Pemberian Perlindungan Sosial

No	Daftar Pertanyaan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1	pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia di dalam panti	36	80	9	20
2	pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia di luar panti	24	53	21	47
3	penanganan bagi lanjut usia terlantar yang meninggal untuk dimakamkan sesuai dengan agamanya	27	60	18	40
4	tanggung jawab dari Pemerintah/masyarakat terhadap lanjut usia terlantar yang meninggal dunia.	27	60	18	40
Jumlah		114	253	66	147
Rata-rata		29	63%	16	37%

Sumber: Data Olahan Tahun 2014

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat kita ketahui bahwa implementasi pada pemberian perlindungan sosial yang berada pada kategori “Baik” sebesar 63% dan yang berada pada kategori “Kurang Baik” sebesar 37%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi terhadap adanya pemberian perlindungan sosial berada pada kategori “Baik”.

8. Bantuan sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraanya. Bantuan sosial tersebut bersifat tidak tetap yang diharapkan berguna untuk mendorong tumbuhnya kemandirian. Bantuan sosial tersebut diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup lanjut usia potensial yang tidak mampu, mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian serta untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha. Berikut data rekapitulasi tentang bantuan sosial berdasarkan PP No 43 Tahun 2004:

Tabel Rekapitulasi Data Tentang Bantuan Sosial

No	Daftar Pertanyaan	Kategori			
		Baik		Kurang Baik	
		F	P (%)	F	P (%)
1	pemberian bantuan sosial tidak tetap berupa material bagi lansia potensial tidak mampu guna mendorong tumbuhnya kemandirian	24	53	21	47
2	pemberian bantuan sosial tidak tetap berupa finansial bagi lansia potensial tidak mampu guna mendorong tumbuhnya kemandirian	13	29	32	71
3	pemberian bantuan sosial tidak tetap berupa fasilitas pelayanan bagi lansia potensial tidak	8	18	37	82

	mampu guna mendorong tumbuhnya kemandirian				
4	pemberian bantuan sosial tidak tetap berupa informasi bagi lansia potensial tidak mampu guna mendorong tumbuhnya kemandirian	18	40	27	60
5	pembinaan berupa bimbingan terhadap lanjut usia potensial yang tidak mampu dalam rangka pemberian bantuan sosial	15	33	30	67
6	pembinaan berupa penyuluhan terhadap lanjut usia potensial yang tidak mampu dalam rangka pemberian bantuan sosial	21	47	24	53
7	pembinaan berupa pemberian informasi, terhadap lanjut usia potensial yang tidak mampu dalam rangka pemberian bantuan sosial	18	40	27	60
8	pembinaan berupa pendidikan terhadap lanjut usia potensial yang tidak mampu dalam rangka pemberian bantuan sosial	0	0	45	100
9	pembinaan berupa latihan keterampilan terhadap lanjut usia potensial yang tidak mampu dalam rangka pemberian bantuan sosial	20	44	25	56
Jumlah		137	304%	268	596%
Rata-rata		15	34%	30	66%

Sumber: Data Olahan Tahun 2014

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat kita ketahui bahwa implementasi pada bantuan sosial yang berada pada kategori “Baik” sebesar 34% dan yang berada pada kategori “Kurang Baik” sebesar 66%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi terhadap adanya bantuan sosial berada pada kategori “Kurang Baik”.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Implementasi PP No 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dikota Batam, masih dilaksanakan dengan “Kurang Baik”. Karena dari 45 orang responden, paling banyak berada pada kategori kurang baik yaitu sebesar 64% dan selebihnya sebesar 36% berada pada kategori baik. Sehingga hipotesis awal yang menyatakan “Implementasi PP No 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Batam pelaksanaannya masih kurang baik” diterima.

Implementasi yang berada pada kategori “Baik” adalah implementasi mengenai pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan dan pemberian perlindungan sosial. Sedangkan implementasi yang berada pada kategori “Kurang Baik” adalah implementasi mengenai pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, serta bantuan sosial.

Rekomendasi

Saran yang dapat penulis berikan guna lebih baiknya implementasi PP No 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di kota Batam adalah:

- a. Meningkatkan peran pemerintah khususnya dinas sosial dan pemakaman kota batam dalam mendata dan mensurvey kondisi lansia yang ada di kota Batam, agar penyaluran bantuan sosial ataupun penanganan bagi para lansia tepat sasaran dan tepat guna.
- b. Menjalin dan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan instansi pemerintah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial lanjut usia di kota batam, baik dari segi kesehatan, perlindungan sosial, keagamaan, pelayanan administrasi, pelatihan, sarana dan prasarana, bidang hukum dan kesempatan untuk memiliki usaha.
- c. Meningkatkan sosialisasi dan penyebaran berbagai informasi mengenai lanjut usia baik kepada masyarakat maupun kepada para lanjut usia itu sendiri.
- d. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan peran masyarakat dalam menangani masalah kesejahteraan sosial lanjut usia dikota Batam.
- e. Mengusahakan dibentuknya panti atau wadah dari pemerintah bagi para lansia untuk berkumpul dan berkegiatan sesama mereka tanpa adanya perbedaan laki-laki atau perempuan, produktif atau non produktif, panti atau non panti, berasal dari keluarga mampu atau tidak mampu, yang berguna untuk meningkatkan kepercayaan diri para lansia bahwa mereka sebagai warga negara lanjut juga masih diperhatikan dan dipedulikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T karena berkat rahmat dan nikmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi PP No 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Kota Batam”. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M Nur Mustafa, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Sri Erlinda, S.Ip, M.Si selaku ketua jurusan P.IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat selesai.
3. Drs. Zahirman, MH selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat selesai.
4. Dr. Hambali, M.Si selaku Ketua Laboratorium Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Riau yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

5. Drs. Ahmad Eddison, M.Si sebagai penasihat akademis dan dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
6. Dr. Gimin, M.Pd selaku dosen yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
7. Supentri, S.Pd, M.pd selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu kepada penulis selama ini.
9. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, Kabid pelayanan dan rehabilitasi sosial dan Kasi Pelayanan anak, keluarga dan lansia yang telah memberikan banyak informasi dan data-data yang penulis butuhkan selama penelitian.
10. Pengelola panti jompo Annissa Ummul Khairat dan panti jompo Buddhayana yang juga telah membantu dan memberikan banyak informasi serta data yang penulis butuhkan dalam penelitian.
11. Para Responden kakek dan nenek yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dimintai keterangan menyangkut angket yang penulis sebar.
12. Kedua orang tua penulis yang juga telah banyak membantu selama proses penelitian penulis berlangsung.
13. Serta banyak lagi pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang juga terkait dalam membantu penelitian yang penulis lakukan.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan salam hormat bagi semua pihak, semoga Allah S.W.T memberikan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Semoga dengan segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, menjadi manfaat besar bagi penulis. Penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi tercapainya kesempurnaan dalam penyusunan karya ilmiah ini, semoga penelitian ini dapat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Husaini Usman. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurul Fadillah. 2012. *Implementasi Perda No. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Masalah Gembel dan Pengemis*. Pekanbaru: Universitas Riau
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-undang No. 13 Tahun 1998 Tentang kesejahteraan Lanjut Usia.